

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PADA PEMBALAKAN LIAR DI SELAT
PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
(Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Srata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Juliyanti
NPM : 137110001**

**PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Juliyanti
NPM : 137110001
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua, Pekanbaru, 18 Juni 2020
Pembimbing,


Lilis Suriani, S.Sos., M.Si


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Juliyanti
NPM : 137110001
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 30 Juni 2020
Sekretaris,

Ketua,



Hendry Andry, S.Sos., M.Si



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Anggota,



Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

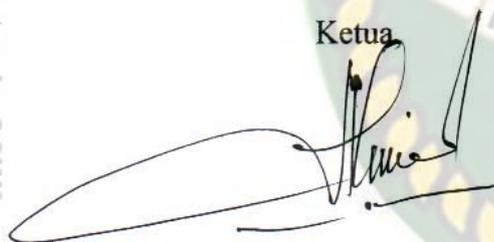
Nama : Juliyanti
NPM : 137110001
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

An Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua



Hendry Andry, S.Sos., M.Si



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Syafri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Sufiani, S.Sos., M.Si

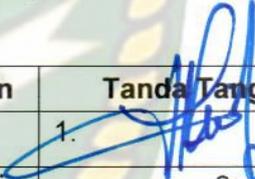
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1207/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 29 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 30 Juni 2020 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Juliyanti
NPM : 137110001
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)**
Nilai Ujian : Angka : " 82 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 30 Juni 2020
An. Dekan



Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1207/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Juliyanti
N P M : 137110001
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Struktur Tim :

1. Hendry Andry, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Eka Komalasari, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dan tenaganya serta memberikan izin kepada penulis dalam penelitian ini.

3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua Program studi Administrasi Publik yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Administrasi Publik yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Administrasi Publik.
8. Kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta masyarakat serta pelaku usaha mikro kayu yang mana telah membantu kelancaran penulis dalam memberikan data guna melengkapi Skripsi ini.

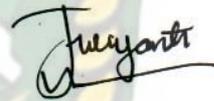
Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat

positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 30 Juni 2020
Pelaku Pernyataan,



Juliyanti
NPM : 137110001

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan.....	18
2. Kegunaan.....	18
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi Publik	19
2. Konsep Organisasi	24
3. Konsep Manajemen.....	28
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	33
5. Konsep Pengawasan.....	36
6. Konsep Hutan dan Kehutanan.....	42
7. Pengertian Pembalakan Liar	43
8. Konsep Pelaksanaan.....	44
B. Kerangka Pikir	45
C. Hipotesis.....	46
D. Konsep Operasional	46
E. Operasional Variabel.....	49
F. Teknik Pengukuran	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Populasi dan Sampel	54

D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data	56
F. Teknik Pengumpulan Data	57
G. Teknik Analisa Data	58
H. Jadwal Kegiatan Peneliti	59
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti	60
B. Sejarah Ringkas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti.....	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	66
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	67
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	69
B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)	70
1. Penetapan Standar Pelaksanaan	72
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan	76
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.....	79
4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan	84
5. Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan.....	87
C. Rekapitulasi Hasil Penyebaran Kuesioner Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Terkait Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)	91
D. Faktor Penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Melakukan Penagwasan Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti	94
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Distribusi Luas Kawasan Hutan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	4
I.2 : Luas Hutan yang Mengalami Kerusakan Akibat Pembalakan Liar dan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	7
I.3 : Data Nama PT yang Memiliki Izin Bergerak Dan Bersumber Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	9
I.4 : Data Nama Pemilik Tempat Usaha Mikro Illegal yang Bersumber Dari Hutan Kabupaten Kepulauan Meranti.....	9
I.5 : Rekapitulasi Data Illegal Logging/Pembalakan Liar Bidang Perlindungan Hutan dan Kebun Kab Kepulauan Meranti.....	10
II.1 : Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	49
III.1 : Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	55
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	59
V.1 : Klasifikasi Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Latar Belakang Jenis Kelamin	67
V.2 : Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Latar Belakang Jenis Kelamin	67
V.3 : Klasifikasi Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	68
V.4 : Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	68
V.5 : Klasifikasi Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	69
V.6 : Klasifikasi Responden Masyarakat Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	69

V.7	: Distribusi Tanggapan Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Indikator Yang Pertama Yaitu “Penetapan Standar Pelaksanaan”	72
V.8	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Yang Pertama Yaitu “Penetapan Standar Pelaksanaan”	73
V.9	: Distribusi Tanggapan Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Indikator Yang Ke Dua Yaitu “Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan”	76
V.10	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Yang Ke Dua Yaitu “Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan”	77
V.11	: Distribusi Tanggapan Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Indikator Yang Ke Tiga Yaitu “Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan”	80
V.12	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Yang Ke Tiga Yaitu “Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan”	81
V.13	: Distribusi Tanggapan Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Indikator Yang Ke empat Yaitu “Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan”	85
V.14	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Yang Ke Empat Yaitu “Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan”	86
V.15	: Distribusi Tanggapan Responden Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terhadap Indikator Yang Ke Lima Yaitu “Pengambilan Koreksi Bila Di Perlukan”	87
V.16	: Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Yang Ke Lima Yaitu “Pengambilan Koreksi Bila Di Perlukan”	88
V.17	: Hasil Rekapitulasi Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pembahasan Indikator Terkait Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	92
V.18	: Hasil Rekapitulasi Masyarakat Pembahasan Indikator Terkait Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	45
IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	: Daftar Kuesioner Anggota Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH Terkait Dengan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	104
2	: Daftar Kuesioner Masyarakat/KK Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terkait Dengan Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	112
3	: Daftar Wawancara Kepala Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	120
4	: Daftar Wawancara Masyarakat Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	124
5	: Rekap Telly Anggota Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	126
6	: Rekap Telly Masyarakat Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	128
7	: Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	131
8	: Dokumentasi Surat terkait dengan judul Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).....	139

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliyanti
NPM : 137110001
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2020
Pelaku Pernyataan,



Juliyanti

Juliyanti

NPM : 137110001

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PADA PEMBALAKAN LIAR DI SELAT
PANJANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
(Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)**

ABSTRAK

Oleh
Juliyanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang pembalakan liar hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan pada pembalakan liar di selat panjang kabupaten kepulauan meranti (studi di kecamatan tebing tinggi barat). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian campuran, dimana jenis penelitian ini menggabungkan antara tabel dan juga analisis hasil wawancara. Indikator dari penelitian ini adalah, (1) Penetapan Standar, (2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, (3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, (4) Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan, (5) Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teori sugiyono. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutannya terhadap Pembalakan Liar di Selat Panjang belum berjalan dengan baik, dimana dengan dasar penelitian yang dilakukan hasil dari penelitian masuk dalam kategori “Kurang Terlaksana”, dengan alasan fakta dilapangan yang masih ditemukannya pembalakan hutan secara liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Pembalakan Liar.

***SUPERVISION OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND
FORESTRY IN ILLEGAL LOGGING IN THE LONG STRAIT, MERANTI
ISLANDS DISTRICT
(Study in Tebing Tinggi Barat District)***

Abstract

By

Juliyanti

This study aims to determine the implementation of supervision of the Environment and Forestry Service on Illegal Logging in the Long Strait of Meranti Islands Regency. The problem raised in this study is about illegal logging of forests carried out by irresponsible persons. The purpose of this study was to determine the implementation of supervision by the environmental and forestry services on illegal logging in the long strait of Meranti Kepulauan district (study in the western high cliff district). In conducting this research, the researcher used a descriptive survey type, with a mixed type of research, where this type of research combines tables and analysis of interview results. The indicators of this study are, (1) Standard Setting, (2) Determination of Activity Implementation Measurement, (3) Measurement of Activity Implementation, (4) Comparison of Implementation with Standards and Analysis of Deviation, (5) Taking Corrections When Needed. Meanwhile, the data analysis technique used is Sugiyono theory. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the implementation of supervision of the Department of Environment and Forestry against Illegal Logging in the Long Strait has not gone well, where on the basis of the research carried out the results of the research fall into the Sufficiently Implemented category, on the grounds of the fact that logging is still found forest by irresponsible persons.

Keywords: Supervision, Environmental Service, Illegal Logging

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Fungsi atau tugas Negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam Negara untuk mencapai tujuan Negara. Fungsi Negara, antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan.

Tujuan Negara Indonesia Telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk mencapai tujuan Negara maka Negara melalui pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam terkandung didalamnya diberikan oleh Negara dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) mengatakan bahwa segala sumber daya Alam baik didalam maupun di atas bumi diatur dan dikuasai oleh negara. Salah satu Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah hutan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah, maka dari itu setiap sumber daya alam patut di jaga dan di lindungi serta di lestarikan seperti Hutan, air, minyak bumi, mineral dan sebagainya. Agar keberlangsungan hidup manusia lebih lama, Manusia bisa memanfaatkan hasil alam dengan secukupnya dan bukanya berlebihan karena akan merusak SDA itu sendiri. seperti halnya hutan, Dalam memanfaatkan hasil hutan harus lah sesuai dengan UU atau izin pemerintah, kalau tidak memiliki izin maka penebangan hutan tersebut melalui cara illegal/tidak sah. Hutan di seluruh daerah di indonesia sangat lah luas maka dari itu pemerintah pusat telah memberikan wewenang dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk dapat melakukan pengawasan pada pembalakan hutan secara illegal di daerahnya masing-masing.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang yang telah di berikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka terbentuklah sebuah organisasi publik yang menangani permasalahan tentang hutan, yang dalam kegiatannya memerlukan sumber daya-Sumber daya yang ada di dalam organisasi publik itu sendiri.sumber daya organisasi ini berkaitan dengan unsur-unsur manajemen yang dimaksud 6M, yangdimana di dalam sumber daya organisasi selain manusia sumber daya lainnya juga harus mendukung dalam proses kegiatan organisasi.

Hasibuan (2012:7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen itu antara lain adalah :

1. Man: Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.

2. Money: Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
3. Materials (bahan-bahan / perlengkapan) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
4. Machines (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
5. Method (cara-carakerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
6. Market : Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warganegara anggota organisasi.

Dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada di dalam organisasi publik maka kinerja organisasi publik lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas didalam sebuah organisasi publik.

Tidak hanya itu, sumber daya organisasi juga di dukung dengan ilmu-ilmu lainnya sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, seperti halnya administrasi, organisasi, manajemen dan manajemen sumber daya manusia.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selat panjang. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3714,19 Km², Sedangkan luas kota Selat panjang adalah 45,44 Km². Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru,

Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Besar yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau TebingTinggi.

Sehubungan dengan kayanya potensi alam yang dapat dijadikan sumber bergerakinya ekonomima syarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satusum berdaya alam yang biasa dimanfaatkan adalah sumber daya hutan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1: Distribusi Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kep. Meranti.

No	Peruntukan Kawasan Hutan	Luas (Ha	Persentase
1	2	3	4
1	Hutan Lindung	1.908,81	0,49 %
2	Hutan Mangrove	48.498,20	12,66 %
3	Hutan Produksi Konversi	172.294,35	44,98 %
4	Hutan Produksi Terbatas	140.493,20	36,67 %
5	Hutan Suaka Alam/Pelestarian Alam	5.101,20	1,33 %
6	Hutan Areal Penggunaan Lainnya	6.941,82	1,81 %
7	Hutan Kawasan Perairan Sungai	7.797,71	2.03 %
Jumlah		383,035.12	100 %

Sumber : DLHK Kepulauan Meranti, Tahun 2019

Dari tabel di atas, merupakan luas kawasan hutan di kabupaten kepulauan meranti yang hasil hutannya dapat di dimanfaatkan oleh masyarakat lokal tentunya dengan surat izin yang telah disetujui oleh daerah setempat dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan sehubungan luasnya hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti maka di perlukan pengawasan bagi instansi yang telah di berikan tugas oleh pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal diatas, untuk mengurus dalam bidang kehutanan, setiap masing-masing daerah telah dibagi tugas untuk mengurus kawasannya sehingga dapat mengoptimalkan kinerja di sebuah organisasi pemerintahan. salah satu Instansi yang melakukan tindakan yang berhubungan dengan kawasan hutan ialah Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang saat sekarang sudah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya merupakan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan satuan kerja perangkat yang mengemban sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup berdiri tahun 2008. Pada tahun 2011 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan hidup, disertai dengan penggabungan bersama dengan kehutanan, hal ini juga mengacu kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh bupati kabupaten kepulauan meranti No 37 tahun 2016 tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi kabupaten kepulauan meranti.

Pada pasal 3 dan pasal 4 mengenai Tugas pokok dan fungsinya serta susunan organisasi dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan disebutkan bahwa Tugas pokok dan fungsi dari dinas lingkungan hidup dan kehutanan :

- 1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dari sajian tugas dan fungsi diatas, salah satu yang menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah Bidang Kehutanan dan Penataan dan Penataan PPLH (Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup) dibagian seksi kehutanan. Adapun tugas bidang tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pasal 9 adalah Bidang kehutanan, penataan dan penataan PPLH melaksanakan pengorganisasian perlindungan hutan dan lingkungan hidup yang meliputi program perencanaan perlindungan, pengawasan, koordinasi, pengelolaan serta penyuluhan hutan di bagian seksi kehutanan. Salah satu tugas yang diemban oleh seksi kehutanan adalah melaksanakan pengawasan terhadap kerusakan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Kehutanan, Penataan dan penataan PPLH di seksi kehutanan adalah melaukan (1) Pengamanandan pemantauan hutan, dan (2) Perlindungan dan pengendalian kerusakan hutan.

Definisi pengawasan menurut (Siagian, 2003:112) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Manusia dalam proses administrasi merupakan sumber daya yang penting didalam suatu orgaisasi, tanpa menepikan sumber daya-sumber daya yang lainnya dimana tanpa sumber daya manusia maka sumber daya yang lain tidak berarti apa-apa. Di dalam organisasi manusia merupakan faktor yang paling utama dan mendasar dalam proses menjalankan sebuah oraganisasi sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Pada saat ini masih adanya kegiatan pembalakan liar/illegal logging di kabupaten kepulauan meranti sangat memprihatinkan sehingga dinas kehutanan dan perkebunan harus melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi pembalakan liar ini. di sini dinas lingkungan hidup dan kehutanan sangat berperan penting atas segala aktivitas pengawasan di dalam kawasan hutan yang melakukan perusakan hutan seperti, pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya. karena itu merupakan tugas dari dinas tersebut. Apa lagi hutan di kabupaten kepulauan meranti sudah semakin sedikit dan ini mengkhawatirkan akan terjadinya bencana alam seperti banjir, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 : Luas Hutan yang Mengalami Kerusakan Akibat Pembalakan Liar dandi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Hutan (Ha)			
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017/19	Tahun 2019
1	Hutan Lindung	± 28 Ha	± 19 Ha	± 3 Ha	± 1 Ha

2	Hutan Mangrove	± 1.100 Ha	± 700 Ha	± 900 Ha	±632 Ha
3	Hutan Suaka Alam/ Pelestarian Alam	± 70 Ha	± 85 Ha	± 20 Ha	± 9 Ha
4	Hutan Kawasan Perairan Sungai	± 44 Ha	± 20 Ha	± 13 Ha	± 8 Ha
5	Hutan Produksi Terbatas	± 3.020 Ha	± 1.500 Ha	± 1.150 Ha	± 1.000 Ha
6	Hutan Produksi Konversi	± 4.532 Ha	± 2.000 Ha	± 1.730 Ha	± 1.346 Ha

Sumber : DLHK Kepulauan Meranti, Tahun 2019

Dari Tabel diatas bahwa hutan pada tahun 2015 lebih banyak mengalami kerusakan di bandingkan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. hutan yang paling sering terjadi kerusakan yakni Hutan produksi Konversi dan Hutan produksi terbatas pada tahun 2015tetapi pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan dari tahun ketahun. Selain itu ada juga hutan mangrove yang mengalami kerusakan dan menyebabkan beberapa kecamatan di kabupaten meranti mengalami abrasi setiap tahunnya sekitar 5-8 km pertahun. Sedangkan hutan lindung, hutan suka alam, dan hutan kawasan perairan sungai mengalami kerusakan tidak sebanyak hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas dan hutan mangrove.

Sebenarnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan yaitu dengan cara melalui izin yang telah di keluarkan oleh pemerintah yang berdasarkan peraturan menteri kehutanan kepada perusahaan yang mengelola kawasan hutan seperti izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI), izin usaha pemanfatan hasil hutan bukan kayu/non kayu (IUPHHBK) dan sebagainya. sedangkanbagi usaha mikro yang menjual kayu harus memiliki izin sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sehingga kayu di jual oleh pemilik usaha mikro legal untuk di jual dan juga memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Berikut ini nama-nama dari PT yang legal dan Pemilik tempat usaha mikro illegal yang bergerak dan bersumber pada hutan sebagai berikut :

Tabel I.3 : Data Nama PT yang memiliki izin Bergerak dan bersumber pada Kawasan Hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Nama PT	No izin SK	Lokasi	Ket
PT. Riau Andalan Pulp and Paper	180/Menhut-II/2013 tgl 21 Maret 2013	Pulau Padang	Legal
PT. Sumatera Riang Lestari Blok V	208/Menhut-II/2007 tgl 25 Maret 2007	Pulau Rangsang	Legal

Sumber : DLHK Kepulauan Meranti, Tahun 2019

Tabel I.4 : Data Nama Pemilik Tempat Usaha Mikro Illegal yang Bersumber Dari Hutan Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Nama Usaha Mikro	Izin Usaha	Alamat Tempat Usaha	Ket
1	Usaha Kayu Amir	-	Jln. Belut Selat panjang	illegal
2	Usaha Kayu Jalal	-	Jln. Belut Selat panjang	illegal
3	Usaha Kayu Aguan	-	Jln. Belut Selat panjang	illegal
4	Usaha Kayu Amran	-	Jln. Tanjung Harapan	illegal

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel I.3 dan I.4 di atas terdapat dua PT yang memiliki izin SK yang masih aktif di kabupaten kepulauan meranti dan selebihnya terdapat tempat usaha kayu mikro yang tidak memiliki izin usaha karena kayu yang di dapat melalui illegal logging. Dari kerusakan yang telah terjadi akibat illegal logging di hutan kabupaten kepulauan meranti penulis juga mendapatkan data mengenai hasil tangkapan kayu illegal di kawasan hutan oleh dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten kepulauan meranti adalah sebagai berikut :

Tabel I.5 : Rekapitulasi Data Illegal Logging/Pembalakan Liar Bidang Perlindungan Hutan dan Kebun Kab Kepulauan Meranti.

No	Barang Bukti	Laporan Kejadian		Kelompok / Jenis Sortimen	Jumlah			Desa
		Nomor	Tanggal		Keping	m ³	Ton	
1	2	3		4	5			6
1.	Polres Resor Kepulauan Meranti	LP/08/II/2014/Riau	27-02-2014	Bakau	3487	39.735	-	Gogok Kec. Tebing Tinggi Barat
2.	Polres Resor Kepulauan Meranti	Pol:R/LI-05/X/2014/Reskrim	12-10-2014	Meranti/Gergajian	196	18,5245	-	Lalang Tanjung
3.	Dishutbun Kab. Kep. Meranti	01/DISHU TBUN/LINHUTB UN/XI/LK/2014	13-11-2014	Meranti/Gergajian	1978	152,1119	-	Tanjung Sari dan Nipah Sendanu
4.	Dishutbun Kab. Kep. Meranti	-	30-10-2015	Meranti/Gergajian	-	-	± 20	Sungai Tohor
5.	Dishutbun Kab. Keb. Meranti	-	01-11-2015	Meranti/Gergajian	-	-	± 10	Tj.Darul Takzim
6.	Dishutbun Kab. Keb. Meranti	-	27-12-2015	Meranti/Gergajian	-	-	21	Lalang Tanjung kec.Tebing Tinggi Barat
Jumlah Total				2174	170, 6364		51	

Sumber: Dinas LHDH Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019

Berdasarkan tabel diatas, terlihat hasil tangkapan dari proses pembalakan liar oleh bidang perlindungan hutan dan kebun dan polres kabupaten kepulauan meranti. Hal ini terlihat bahwa masih adanya terjadi kerusakan hutan seperti pembalakan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ada pun beberapa faktor pendorong terjadinya pembalakan liar/illegal logging diantaranya :

1. kebutuhan kayu untuk kebutuhan
2. permintaan pasar oleh para usaha kayu dan pemasukan kayu tanpa permintaan pasar
3. kurangnya pengawasan oleh dinas di kawasan hutan
4. kondisi sosial masyarakat miskin sehingga melakukan kegiatan illegal logging sebagai mata pencarian turun temurun.

Disini perlu adanya pengawasan dan sosialisasi dari dinas kehutanan dan perkebunan agar para pembalakan liar dapat di kurangi. Dalam melakukan kegiatan pengawasan dinas kehutanan dan perkebunan melakukan koordinasi dengan pihak polres kabupaten kepulauan meranti dan personil polisi kehutanan yang sebagaimana tugas polisi kehutanan sudah tercantum di Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/menhut-II/2014 tentang polisi kehutanan untuk melakukan tanggung jawab beserta tugas dan fungsi pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.75/menhut-II/2014 tentang polisi kehutanan pada pasal 4 meliputi :

- (1) Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (2) Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

- a. preemtif;
- b. preventif; dan
- c. represif.

Ada pun tugas Polhut dari tiga bentuk di atas dari observasi penulis menjelaskan program aksinya dalam melakukan pengawasan yaitu :

- preemtif yaitu polhut melakukan pembinaan pada masyarakat dan melakukan menyadartahukan di daerah/desa yang rawan terjadinya perusakan hutan seperti pembalakan liar atau pun kebakaran hutanbahwa hutan harus di jaga dan lestarikan.
- Preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Seperti melakukan perondaan di kawasan hutan dan penjagaan di kawasan hutan sesuai dengan perintah pimpinan
- Reprensif yaitu polhut melakukan pengumpulan bahan keterangan seperti pengamanan barang bukti, penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan, penanggulangan konflik satwa liar, pemadaman kebakaran dan pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, sehingga disusunlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Undang-undang P3H yang terdiri dari 12 Bab dan 114 Pasal ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas dua orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan. Ini lah tindak pidana pada UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (P3H). Pada pasal 11 dan 12 UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, ketentuan perbuatan perusakan hutan meliputi :

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) pada pasal 12 sudah memiliki larangan bagi para pelaku yang melakukan penebangan pohon secara illegal yakni meliputi: Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah negara kesatuan republik indonesiamelalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yangdiketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yangdiambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayuyang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dalam memanfaatkan hasil hutan dari penebangan, pemuatan, pengangkutan hingga pembakaran di tempat penimbunan kayuyang dilakukan perseorangan atau kelompok orangharus sesuai dengan izin pemanfaatan kayu (IPK)yang terbitkan oleh pejabat penerbit IPK/ Kepala Dinas Kabupaten atau provinsi yang di pertimbangkan oleh Bupati/Gubernur dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Indonesia. Dengan mengajukan syarat-syarat yang

telah di tentukan dengan surat permohonan kepada pejabat yang menerbitkan surat izin IPK tersebut.

Dari UU Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatas sudah dijelaskanapa bila orang perseorangan dengan sengaja melakukan pembalakan liar/illegal logging dan tidak memiliki surat izin maka akan di jatuhkan dendamau pun hukuman pidana penjara. Biasanya kegiatan pembalakan liar lebih banyak di temui lebih dari satu orang atau berkelompok. Disini walaupun dinas kehutanan melakukan pengawasan masih belum efektif karena jumlah petugas yang masih ada kendala seperti jumlah petugas kepolisian dan dinas masih minim sehingga tidak semua hutan di kabupaten di meranti mendapatkan pengawasan. Kebanyakan para pelaku pembalakan liar ini merupakan masyarakat suku asli kabupaten meranti yang mata pencariannya masih bergantung pada penjualan kayu olahan.

Dari penjelasan di atas mengenai tugas dan fungsi dinas kehutanan dan perkebunan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan di perkuat dengan UU Republik Indonesia No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sehingga permasalahan pembalakan liar tidak meluas dan dapat di kurangi oleh dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten kepulauan meranti.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa fenomena yang terjadi mengenai kegiatan pembalakan liar/illegal logging, yang masih terjadi di kecamatan tebing tinggi barat. Degan demikian dapatditarik kesimpulan bahwa:

1. Kurang Maksimalnya pengawasan akibat terbatasnya jumlah anggota pegawai sehingga penjagaan hutan dan patroli yang dilakukan bidang

Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH masih terdapat kegiatan pembalakan liar di kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti.

2. Kurangnya sosialisasi oleh bidang kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH kepada masyarakat yang berada di kecamatan tebing tinggi barat agar aktivitas pembalakan liar dapat berkurang dan tidak terus terjadi di kabupaten kepulauan meranti.
3. Adanya kerja sama antara para pelaku pembalakan liar dengan oknum kepolisian dalam melancarkan proses pengangkutan hasil pembalakan liar yang telah dilakukan, hal ini penulis dapat penulis lihat dari pra observasi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)”.

B. Perumusan Masalah

Dalam proses pencapaian tujuan sebuah organisasi, maka salah satu usaha yang sangat berperan adalah pelaksanaan tugas dalam diri pegawai serta dibutuhkan kesadaran masyarakat. Hal ini bermaksud untuk mencapai hasil yang optimal. Dari penjelasan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : **“Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat) ?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan pada pembalakan liar di selat panjang kabupaten kepulauan meranti (studi di kecamatan tebing tinggi barat) .

2. Kegunaan penelitian

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Guna teoritis, ialah penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang administrasi publik.
- b. Guna akademis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Kehutanan dan perkebunan di bidang Kehutanan, penataan dan penataan PPLH tentang pelaksanaan pengawasan pada pembalakan liar di selatpanjang kabupaten kepulauan meranti (studi di kecamatan tebing tinggi barat).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai acuan untuk menjawab tujuan penelitian ini, penulis mengembangkan beberapa studi kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut ini penulis mengemukakan konsep-konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Konsep Administrasi Publik

Siagian, (2003;2) berendapat Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Prestus, 1960 Orang dapat memulai dengan menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama(dalam wirman 2012;7)

Menurut Adam, 1913 administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain didalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan- kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan. (dalam wirman 2012;9).

Menurut Gladden, (1953) (dalam wirman 2012;10) Administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarahan sumber daya manusia dan sumber – sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Menurut Silalahi administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam

struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli 2005:20). Berangkat dari teoritis batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi

Sedangkan menurut Simon menyebutkan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (dalam Pasolong 2007:2). Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

The Liang Gie mendefenisikan administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam Inu Kencana, 2003:4). Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwasanya dalam suatu administrasi ada terdapat suatu proses kerjasama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah: manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

Pasolong (2007:3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Sedangkan menurut Sugandha administrasi negara adalah:

“Merupakan sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya, dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara bekerja sama dengan dan melalui orang-orang, baik individu maupun kelompok secara terkoordinasi” (dalam Ibrahim, 2004:10).

Zulkifli (2005: 20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai.

Menurut Wirman (2012:11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi
4. Kepegawaian

5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

Sedangkan administrasi dipandang dalam arti sempit dapat dicermati dari definisi berikut:

Administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (koresponden) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Jadi administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan atau kesekretariatan berupa surat-menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Zulkifli. 2005;16).

Menurut Chandler dan Plano mengatakan administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (dalam Pasolong 2007:7).

Sedangkan menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Pasolong 2007:7) mendefinisikan administrasi publik, adalah:

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau

lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Rosenbloom and Goldavan mengatakan bahwa administrasi publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat (dalam Wirman 2012:20). Sedangkan menurut Levine, Peter, and Thomson berpendapat administrasi publik memusatkan perhatiannya ada berbagai kebijakan dan program organisasi pemerintah, termasuk perilaku para pejabat (yang biasanya tidak dipilih) yang secara formal bertanggung jawab atas perilaku mereka (dalam Wirman 2012:21).

Banyak defenisi dari administrasi publik dan menurut Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah

“Urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta” (dalam Wirman, 2012:21).

Sedangkan menurut Marshall Edward Dimock & Glady Ogden Dimock mengatakan administrasi publik adalah

“Penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, elainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan” (dalam Wirman, 2012:22).

Sedangkan Menurut Siagian (2003:7) administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Dengan berbagai defenisi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses kerjasama sekelompokorang yang pelaksanaanya terdiri dari aparatur sipil negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan untuk mencapaitujuan negara secara efektif dan efisien.

2. Konsep Organisasi Publik

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian(2003:6).

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri – sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah di sepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya batuan dari orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Menurut E. Wight Bakke Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiverensasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan

menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumberdaya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdaya dalam lingkungannya. (dalam Kusdi. 2009;5)

Selanjutnya Zulkifli (2005:74) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Chester L. Bernard mendefinisikan organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (dalam Sjamsuddin Indradi 2006:19).

Sedangkan menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu : yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu : Organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal. Banyak yang mendefinisikan pengorganisasian menurut Siswanto mengatakan bahwa pengorganisasian adalah

“Berdasarkan deskripsi tentang organisasi, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien”(Siswanto 2005:75).

Sebagai alat administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan Siagian (2003:96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hierarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi. Dasar hubungan yang bersifat informal menurut Siagian (2003:96) antara lain adalah :

1. Hubungan yang didasarkan pada *Personal Relations*
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi

Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005;98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan

Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi

2. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.

3. Tanggung Jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka

4. Spesialisasi untuk Efisiensi

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

5. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

Dari definisi organisasi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat proses aktifitas-aktifitas kerjasama sekelompok orang atau organisasi pemerintah yang dimana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama secara efektif dan efisien.

3. Konsep Manajemen

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendaya gunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (Siagian 2003;5). 087841414888

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (*human and natural resources*) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005;9).

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005;2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Menurut Stoner manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli, 2005:28).

Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah: Ketatalaksanaan, manajemen, *management* dan pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu “Manajemen” mengandung tiga pengertian:

- Manajemen sebagai suatu proses
- Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
- Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

Kemudian menurut Darwis dkk (2009:5) yang mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Terry mengatakan, secara esensial seorang menejer adalah seorang ilmuwan dan seniman. Ia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat disusun menurut sistem yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya (dalam Siswanto. 2005;10).

Suatu proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Proses adalah suatu cara sistematis untuk menjalankan suatu

pekerjaan. Proses manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Rangkaian aktivitas dimaksudkan adalah merupakan fungsi seorang manajer. Fungsi manajer tersebut membentuk suatu proses keseluruhan.

Menurut Siswanto (2005;23) Kajian fungsi manajer secara garis besarnya dapat di lihat dari dua arah , yaitu fungsi manajer kedalam organisasi dan fungsi manajer keluar organisasi. Fungsi manajer kedalam organisasi dapat dilihat dari dua sudut berikut :

1. Fungsi manajer dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian.
2. Fungsional manajer dari sudut spesialisasi kerja, yaitu keuangan, ketenagakerjaan, pemasaran, pembelian, produksi, dan sejenisnya.

Sedangkan fungsi manajer keluar organisasi meliputi aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar organisasi, yaitu menyangkut masalah yuridis, keuangan, administrasi, hubungan antarmanusia, dan sejenisnya.

Menurut Handoko (2009;6) manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utamadiperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tujuan, sasaran sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam organisas, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, assosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Stoner mengatakan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan menggunakan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (dalam Handoko. 2009;8).

Handoko (2009;8) mengatakan, proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Henri Fayol mengatakan, bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama manajemen. (dalam Handoko.2009;21)

Sedangkan menurut Handoko (2009;23-25) manajemen memiliki 5 fungsi yang menurut penulis paling penting yaitu :

1. Perencanaan, rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu.
2. Pengorganisasian, adalah 1) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi dan dikoordinasikan.
3. Penyusunan personalia, adalah penarikan, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif.

4. Pengarahan, yang berfungsi sebagai untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan.
5. Pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Negara merupakan suatu organisasi yang juga menggunakan sistem administrasi dan Manajemen, Aristoteles berpendapat Negara adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa, guna memperoleh hidup yang sebaik baiknya. (dalam Kencana 2005;78)

Menurut Jean Bodin Negara ialah suatu persekutuan dari pada keluarga keluarga dengan segala kepentinganya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. (dalam Kencana 2005;78)

Menurut Sumantri Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama Negara, selalu kita jumpai adanya organ atau alat pelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya. (dalam Kencana 2005;79).

Kesimpulan dari definisi manajemen diatas adalah suatu proses merencanakan strategi, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengawasan bagi pemimpin kepada anggota organisasi. pemimpin yang menduduki suatu jabatan di sebut dengan manajer yang memiliki seni dan ilmu sehingga dapat mengatur para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya dengan ini dapat tercapainya tujuan-tujuan organisasi yang telah disepakati bersama.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat didalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu dimanajemen.

Menurut Veithzal Rivai (2009:1) manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya manusia dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Maka berbagi pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang di sebut manajemen sumber daya manusia. Istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya *me-manage* (mengelola) sumber daya manusia (dalam Suwatno, Donni juni priansa 2014;29).

Menurut Hasibuan (2012;10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya Hasibuan (2012:7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen itu antara lain adalah :

- *Man* :Man dalam organisasi publik diaartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
- *Money* : Uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha(besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
- *Materials* (bahan-bahan/perlengkapan) : Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
- *Machines* (alat-alat) : Mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
- *Method* (cara-cara kerja) : Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada cara pelaksanaannya dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan.
- *Market* : Market dalam organisasi publik diartikan sebagai masyarakat atau warga negara anggota organisasi.

Dalam perkembangannya unsur *man* (manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yaitu *man* (manusia). Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi, maka untuk itu sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Menurut Martoyo (2000:19) yang merincikan tujuan dari manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

1. Tujuan organisasional, adalah untuk tercapainya efektivitas maksimal dari sebuah organisasi.
2. Tujuan Fungsional adalah : bahwa secara fungsional tujuannya harus sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar.
3. Tujuan Sosial yaitu: setiap organisasi apapun tujuannya harus mengikat akibatnya bagi kepentingan masyarakat umum.
4. Tujuan Personal, yaitu: kepentingan personal atau individual dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer.

Selanjutnya Martoyo (2000:25) yang mengatakan bahwa aktivitas manajemen sumber daya manusia adalah segala tindakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dan mempertahankan suatu jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi agar tujuan manajemen tercapai dengan baik dan tepat.

Sedangkan definisi yang dikemukakan Kiggundu manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat, nasional, dan internasional (dalam Faustino. 2003;4).

Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (*satisfied*) dan memuaskan (*satisfactory*) bagi organisasi. Lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi (Faustino. 2003;4) antara lain :

1. Rancangan organisasi
2. staffing
3. Sistem reward

4. manajemen performansi
5. pengembangan pekerja dan organisasi
6. komunikasi dan hubungan masyarakat rakat, nasional, dan internasional (dalam Faustino. 2003;4).

Nawawi (2008:41) yang menyebutkan bahwa ada tiga pengetian sumberdaya manusia adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
3. Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material dan non finansial) di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (*real*) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi sebuah organisasi.

Dengan adanya Manajemen Sumber Daya Manusia, maka sumber daya manusia dapat lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan organisasi dengan menggerakkan atau memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang lainnya untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang semestinya.

5. Konsep Pengawasan

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan begitu penting untuk dilakukan mengingat bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen guna menjamin setiap kegiatan yang telah direncanakan akan terlaksana dengan baik. Salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan setiap organisasi adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi. Pengawasan

itu harus bersifat membimbing agar pelaksanaan meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti ditengah pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan menurut Arsyad (2002;20) merupakan alat untuk mengukur dan menilai hasil rencana yang dicanangkan, memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna.

Siagian (2003;112) menyatakan pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Handoko (2009;359) menyatakan pengawasan adalah proses untuk "menjamin" bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Menurut Handoko (2009;363) tiga standar yang umum digunakan dalam tahapan proses pengawasan adalah:

1. Standar-standar fisik, mungkin meliputi kualitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
2. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan dan sejenisnya.
3. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas suatu pekerjaan harus diselesaikan.

Menurut Mokler Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin

bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (dalam Siswanto, 2005;139).

Berdasarkan serangkaian batasan diatas,terlihat bahwa pengawasan memiliki konsekuensi membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang diraih oleh organisasi tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi harus diingat, tujuan pengawasan bukanlah untuk mencari-cari kesalahan melainkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya menurut siagian (2003:115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan mempergunakan dua macam teknik,yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk Tertulis ataupun lisan.

Selanjutnya Menurut Sarwoto (1991;103) mengatakan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pengawasan langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk :
 1. Inspeksi langsung.
 2. Observasi di tempat.
 3. Laporan di tempat yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan.

b. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Laporan ini dapat berbentuk :

1. Laporan tertulis.
2. Laporan lisan.

Maksud dari pengawasan tersebut merupakan suatu cara untuk mencegah atau memperbaiki penyimpangan dan kesalahan yang tidak sesuai dengan tugas tugas, wewenang yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kneither (dalam zulkifli, 2005:216) manajemen pengawasan akan efektif jika terpenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. Integrasi, pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhan sistem organisasi atau *built in control*.
2. Objektif, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang objektif.
3. Akurat, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang akurat.
4. Tepat waktu, informasi yang dilibatkan kepada sistem kontrol harus tepat waktu.
5. Fleksibel, sistem pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasi perubahan perubahan dan penyesuaian.

Sifat dan waktu pengawasan menurut Hasibuan (2009:247) dibedakan atas beberapa macam, yaitu:

1. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

3. pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, persemester, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan - peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Menurut Handoko (2009;361) ada tiga tipe-tipe pengawasan, tiga tipe pengawasan itu adalah :

- a. Pengawasan Pendahuluan
Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut *steering controls*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan Yang Dilakukan Bersamaan Dengan Pelaksanaan Kegiatan (*Concurrent Control*)
Pengawasan ini, sering disebut pengawasan “*Ya-Tidak*”, *screening control* atau “*berhenti-terus*”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan Umpan Balik
Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past – action*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan tentu harus ada tahap-tahap yang akan dilakukan dalam proses pengawasan. Menurut Handoko (2009;362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap. Tahap-tahapnya adalah :

- a. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)
Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu :
 - c.1 Pengamatan (Observasi)
 - c.2 Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis
 - c.3 Metoda-metoda otomatis, dan
 - c.4 Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel
- d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).
- e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, Siswanto (2005;140) menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja.
- b. Mengukur kinerja.
- c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
- d. Mengambil tindakan perbaikan.

Timbulnya pengawasan disebabkan oleh adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya memunculkan keraguan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Selain itu, sistem pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan. Sistem pengawasan tersebut juga harus mampu melaporkan dengan cepat kalau terjadi penyimpangan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat.

6. Hutan dan Kehutanan

Hutan merupakan kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Dari sudut pandang orang ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan dalam hak pengusahaan hutan (HPH) (dalam Arifin Arief, 2001:11).

Hutan bukan semata-mata kumpulan pohon-pohon yang hanya dieksploitasi dari hasil kayunya saja, tetapi hutan merupakan persekutuan hidup alam hayati atau suatu masyarakat tumbuhan yang kompleks yang terdiri atas pohon-pohon, semak, tumbuhan bawah, jasad renik tanah, hewan dan dalam lingkungannya. Semuanya itu mempunyai keterkaitan dan hubungan ketergantungan satu sama lain.

ilmu kehutanan merupakan suatu ilmu biologi terapan yang khusus yang mempelajari hukum-hukum yang terdapat di dalam masyarakat tumbuh-tumbuhan berupa bentuk hutan bagi kepentingan manusia (dalam Arifin Arief 2001:14).

Kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Tujuan pembangunan kehutanan Indonesia adalah membagi lahan hutan ke dalam pengelolaan yang terdiri atas, pengelolaan hutan produksi berfungsi ekonomi dan ekologi yang sama kuat atau seimbang, pengelolaan hutan konservasi yang berfungsi ekologi, dan pengelolaan hutan kebun kayu sebagai fungsi ekonomi (dalam Arief 2001:14).

7. Pengertian Pembalakan Liar

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: *illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin otoritas setempat. Pembalakan liar menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Kegiatan pembalakan telah mengubah lahan hutan menjadi gundul secara cepat.

Dari pengertian di atas pembalakan liar merupakan penebangan/perambahan di kawasan hutan yang tidak memiliki surat izin yang resmi maka

kegiatan tersebut di lakukan dengan cara tidak sah. Dari kegiatan pembalakan liar akan membuat fungsi hutan rusak seperti akibatnya terjadi banjir, longsor dan sebagainya.

8. Konsep Pelaksanaan

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam organisasi. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan anggota didalam organisasi.

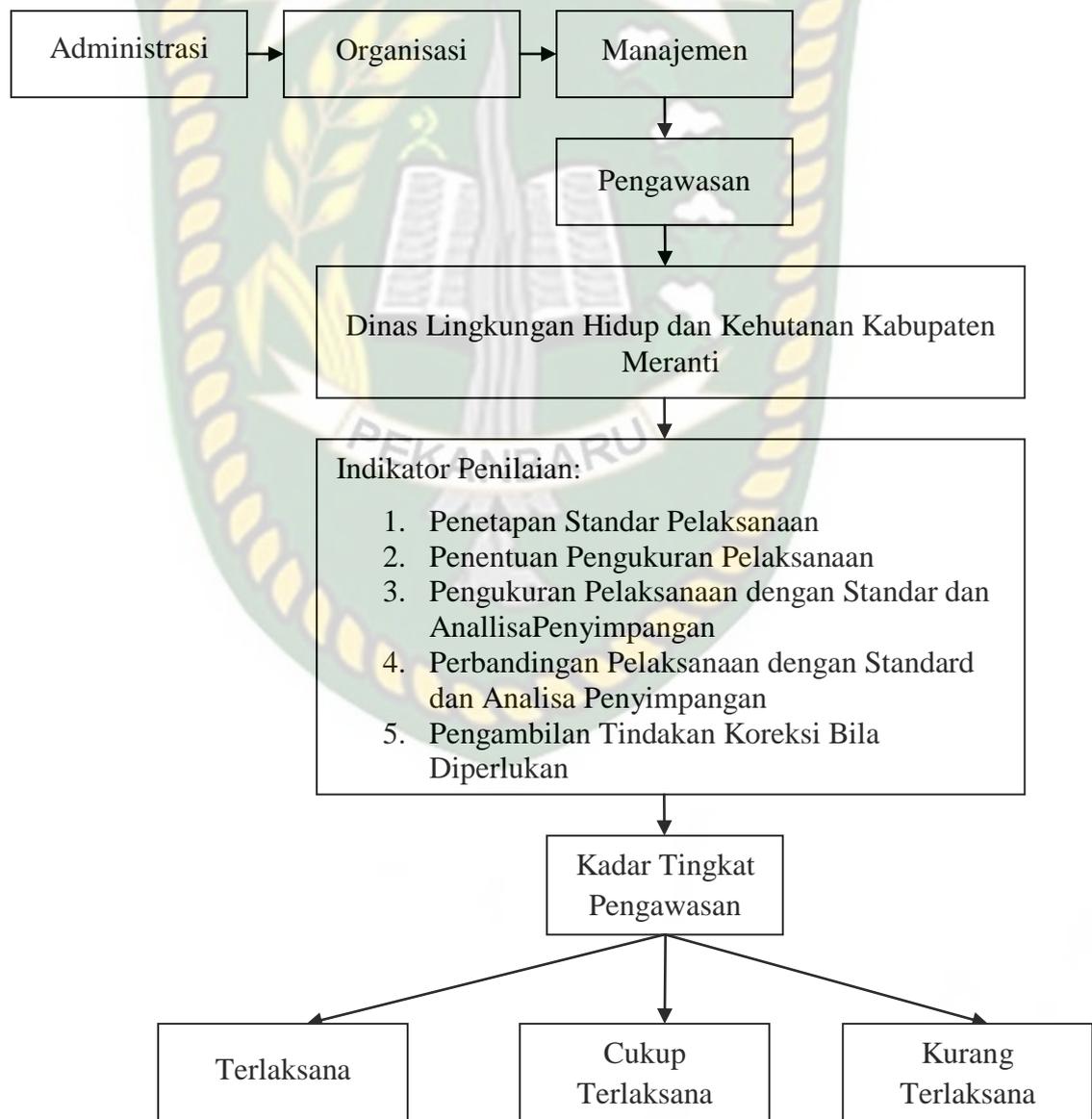
Bintaro Tjokroadmudjoyo (dalam Andisasmita, 2011;24) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu di turunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat di pahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan. Selanjutnya Westra (dalam Andisasmita, 2011:24) mengemukakan pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan di tetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan ala-alat yang di perlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktu di mulainya.

Menurut Syauckani dkk (2004;295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya menurut Winarno (2012;138) implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Selat panjang Kabupatena Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)



Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2020

C. Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah diduga tingkat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti kurang terlaksana hal ini juga sesuai dengan temuan penulis di lapangan.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional. Untuk lebih jelasnya penelitian ini memberi batasan berupa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variable tersebut).

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah atau sekelompok manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk

memperoleh sesuatu hasil yang di inginkan dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan yang dilakukan orang lain.

4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi.
5. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dijalankan sebuah organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
6. Penetapan Standar Pelaksanaan adalah mencangkup standardan target dalam kegiatan yang telah ditetapkan oleh instansi dalam mengawasi para pelaku pembalakan liar yang sering terjadi di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan menentukan dan mengukur apa-apa saja kegiatan yang harus dilaksanakan oleh dinas kehutanan dan perkebunan di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan meranti. Seperti halnya melakukan kerjasama dengan pihak terkait, membuat laporan, dan ketepatan waktu kegiatan.
8. Pengukuran pelaksanan kegiatan adalah pengukuran kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang di inginkan.
9. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan merupakan perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang

direncanakan atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan-penyimpangan (deviasi). Sehingga penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat tercapai, dan apabila penyebab penyimpangan diketahui, maka harus diambil tindakan perbaikan.

10. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan adalah Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Karena dalam hal ini tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Seperti standar, sasaran atau tugas yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin diubah, pelaksanaan kegiatannya diperbaiki, atau mungkin keduanya dilakukan bersamaan.
11. Pembalakan liar atau penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Pembalakan liar menjadi penyebab utama kerusakan hutan seperti banjir dan Kegiatan pembalakan telah mengubah lahan hutan menjadi gundul secara cepat.
12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang, tepat dan terperinci, biasanya pelaksanaan ini dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
<p>pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya Siagian (2003;112)</p>	<p>Pengawasan</p>	1. Penetapan standar pelaksanaan	<p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat</p> <p>b. Melakukan penjagaan perlindungan hutan</p> <p>c. Melakukan pemeliharaan hutan</p>
		2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	<p>a. Melakukan pemantauan</p> <p>b. Membuat laporan kegiatan</p> <p>c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait</p>
		3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan	<p>a. Evaluasi dan Pemantauan Hutan</p> <p>b. melakukan kajian dampak lingkungan hutan</p> <p>c. Sidak (inspeksi Mendadak)</p>
		4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	<p>a. Membuat pos penjagaan</p> <p>b. Laporan dari masyarakat</p> <p>c. Inspeksi/ pemerisaan rutin</p>
		5. Pengambilan koreksi bila di perlukan	<p>a. Sanksi Peringatan tertulis</p> <p>b. Sanksi penarikan barang bukti</p> <p>c. Diproses atau di adili</p>

Sumber: Olahan Data Penulis, 2020

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

▪ Ukuran Variabel

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator pelaksanaan pengawasan dinaslingkungan hidup dan kehutanan pada pembalakan liar di selatpanjang kabupaten kepulauan meranti (studi di kecamatan tebing tinggi barat) 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Indikator pelaksanaan pengawasandinaslingkungan hidup dan kehutanan pada pembalakan liar di selatpanjang kabupaten kepulauan meranti (studi di kecamatan tebing tinggi barat) 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap Indikator pelaksanaan pengawasan dinas lingkungan hidup dan kehutanan pada pembalakan liar di selatpanjang kabupaten kepulauan meranti (studi di kecamatan tebing tinggi barat) 1-33%.

▪ Ukuran Indikator Variabel

1. Menetapkan Standar Pelaksanaan

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penetapan standar pelaksanaan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penetapan standar pelaksanaan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penetapan standar pelaksanaan berada pada skala 1-33%

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 1-33%

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengukuran pelaksanaan kegiatan berada pada skala 1-33%.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan.

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan berada pada skala 1-33%

5. Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan berada pada skala 1-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian survey deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara kuisisioner, wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang di peroleh di jadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti(studi di kec. Tebing tinggi barat).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan tebing tinggi barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun pertimbangan penulis memilih kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti sebagai obyek penelitian yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi karena di kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti peneliti melihat dan mengamati masih adanya terjadinya kegiatan pembalakan liar yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal ini yang merupakan menjadi tugas dan wewenang dari dinas lingkungan hidup

dan kehutanan di bidang kehutanan, penataan dan penataan PPLH dalam melakukan pengawasan di kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2010:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan, masyarakat kec. Tebing tinggi barat dan pelaku usaha mikro di kabupaten meranti.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010; 91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang telah dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili. Sedangkan menurut Arikunto (2006:131), pun menuturkan bahwasanya Sampel merupakan sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan penelitian tersebut penelitian Sampel. Dalam pengambilan sebuah sample tersebut dengan pandangan Sutrisno Hadi (2004:81) bahwa tidak ada definisi absolut, terdapat

beberapa sebuah persentase sampel harus diambil dari populasi kecuali ada tekad mutlak bahwa peneliti tidak boleh ragu.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1: Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang kehutanan, penataan dan penataan PPLH	1	1	100%
2	Anggota Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH	13	10	77%
3	Pelaku Usaha Mikro, Penjual Kayu Hasil Tebangan Dari Hutan.	4	4	100%
4	Masyarakat yang diwakili per Kartu Keluarga di Kec. Tebing Tinggi Barat	3447 KK	20 KK	100%
Total		3365	35	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

1. Untuk Kepala bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH, dilakukan *Teknik Sensus* dengan pengambilan keseluruhan populasi menjadi sampel, karena jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti.

2. Untuk anggota Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH, digunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling* yaitu penulis menentukan sendiri besar sampel yang akan diambil, ditetapkan sebesar 50% dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.
3. Untuk Masyarakat yang diwakili per Kartu Keluarga di Kec. Tebing Tinggi Barat dan pelaku usaha mikro penjualan kayu digunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, angket (kuesioner) dan observasi. Berupa tanggapan responden tentang standar yang digunakan untuk melakukan pengawasan, bentuk pengawasan yang dilakukan dan pengambilan tindakan perbaikan berupa pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku oleh Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

2. Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini dapat berupa arsip, literature serta laporan tertulis yang berhubungan dengan

Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berupa Sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tugas, fungsi dan wewenang Dinas Peraturan tertulis berupa Undang Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap focus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan tertulis Pegawai Bidang Perlindungan Hutan dan Kebun pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyangkut masalah yang diteliti untuk di isi sesuai alternative jawaban yang telah disediakan, untuk menggali informasi tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Interview (Wawancara)

Yaitu, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang wewenang di bidang Kehutanan, penataan dan penataan

PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai Responden dalam mendapatkan data mengenai jumlah pegawai, standar pengawasan yang dilakukan, dll.

3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditujukan pada subjek penelitian, melalui dokumen seperti Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan UU Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian bahanbukti, dan bahan analisa.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal Waktu Kegiatan

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kehutanan dan Perkebunan terhadap Pembalakan Liar di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke																							
	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan UP	■																							
Seminar UP			■																					
Revisi UP				■																				
Revisi Kuisisioner					■																			
Rekomendasi Survey								■																
Survey Lapangan									■															
Analisis Data												■												
Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													■											
Konsultasi Revisi Skripsi															■									
Ujian Konferehensif																■								
Revisi Skripsi																				■				
Pengadaan Sripsi																					■			

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.

Serta Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km²

Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, Kabupaten Bengkalis
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang baru dimekarkan lima tahun silam, banyak terjadi perkembangan diberbagai aspek, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembangunan, maka dari itu masyarakat saling bekerjasama untuk pembangunan di kabupaten kepulauan meranti. Salah satunya selerasinya masyarakat beragama yang selaras didalam perkembangan kabupaten kepulauan meranti. Dimana terdapat tujuh kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat di kabupaten kepulauan meranti. Yaitu Islam 160,585 Jiwa, Kristen 12,370 Jiwa, Katolik 168 Jiwa, Budha 23,961 Jiwa, Konguchu 1,374 Jiwa, dan Hindu 75 Jiwa, serta sarana ibadah yang ada di kabupaten kepulauan meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi, terdapat banyak etnis di kabupaten kepulauan meranti tersebut, diantaranya Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa dan Tionghoa. Sebagai Kabupaten kepulauan,

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penompang kehidupan masyarakat disana dimana masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang

penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang banyak terdapat parit-parit baik keberadaannya secara proses alami atau yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas, di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam, yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A di daerah Kurau desa Lukit (Kecamatan Merbau), yang mampu produksi 8500 barel/hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi sebesar 12 MMSCFD (juta kubik kaki per hari) yang direncanakan penggunaannya dimulai 2011–2020.

Di sektor Non Migas kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi beberapa jenis perkebunan seperti sagu (*Metroxylon sp*) dengan produksi 440.309 ton/tahun (2012), kelapa: 50.594,4 ton/tahun, karet: 17.470 ton/tahun, pinang: 1.720,4 ton/tahun, kopi: 1.685,25 ton/tahun. Hingga kini potensi perkebunan hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku keluar daerah Riau dan belum dimaksimalkan menjadi industri hilir, sehingga belum membawa nilai tambah yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara di sektor kelautan dan perikanan dengan hasil tangkapan: 2.206,8 ton/tahun. Selain itu masih ada potensi dibidang kehutanan, industri pariwisata, potensi tambang dan energi.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari

Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kini dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rangsang 17 desa/kelurahan dan Rangsang Barat dengan 16 desa/kelurahan dan kecamatan yang dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Pulau Merbau dan Tebing Tinggi Timur dengan 7 desa/kelurahan. Jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 76,763 Jiwa, dan Kecamatan Rangsang Pesisir hanya memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu 10,778 Jiwa.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 265,706 Jiwa dimana terdapat berbagai macam suku, agama dan mata pencarian yang berbeda. Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang bagi hidup masyarakat, dimana sebagian besar bekerja sebagai petani, berkebun, bertenak, perikanan, dagang.

Pada bidang pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas tanaman padi sebanyak 2,523 ha; jagung 123 ha; ketela rambat 51 ha; ketela pohon 98 ha; dan kacang tanah 10. Demikian pula dibidang perkebunan , untuk area tanaman perkebunan yang dimiliki penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 29,920 ha; untuk perkebunan kelapa, 15,883 ha; untuk luas area perkebunan karet, sagu 32,022 ha; kopi 1,130 ha; dan perkebunan pinang 480 ha; dimana jumlah produksi perkebunan milik penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti semakin lama semakin meningkat.

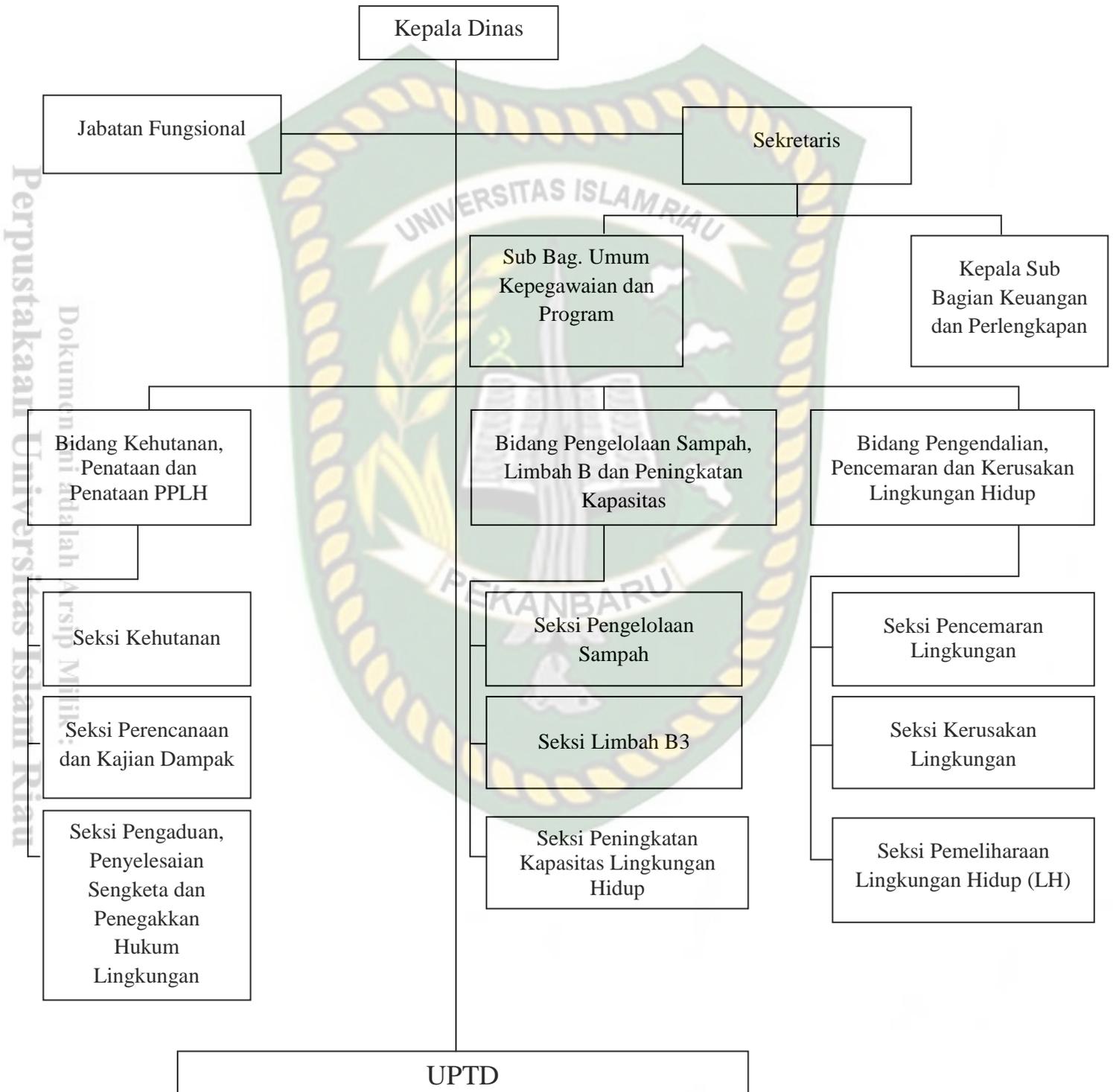
Dibidang perternakan, perikanan dan berdagang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki hasil yang cukup produktif dimana untuk diperternakan sendiri memiliki hasil 6,083 ekor untuk kambing, 4,208 ekor sapi, 44,035 ekor ayam beras, dan 8,731 ekor itik, hal serupa terjadi di bidang perikanan dimana tercatat 27,85 kolam yang dimiliki penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk di sektor perdagangan sendiri masyarakat disana cukup banyak. Hal ini terlihat dari jumlah pasar tradisional dan tempat usaha dengan 1,018 kios yang dimiliki untuk berdagang/usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang pemerintah lakukan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai melayu, Islam, dan modernisasi. Ketiga aspek ini merupakan tujuan integral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Kesemuannya itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh masyarakat di bahu pemegang kekuasaan didaerah tersebut dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajarannya, untuk tetap menjadikan Melayu dan Islam sebagai jati diri anak-anak melayu dalam upaya membangun dan memajukan negeri, agar identitas tersebut tetap terjaga di tengah-tengah arus globalisasi.

B. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti

Untuk melihat struktur organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis akan menyajikannya pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kab. Kep.Meranti, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis, yang sangat berperan penting adalah responden, karena pada dasarnya penelitian ini mengangkat masalah tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat), jadi data-data yang di dapat dalam penelitian ini bersumber dari Pegawai dinas tersebut dan menggunakan cara yaitu dari hasil penyebaran kuesioner, penulis mengharapkan bahwa pegawai bisa memberikan informasi terkait masalah-masalah yang sedang penulis teliti khususnya tentang pembalakan liar di Kabupaten Meranti .

Sehubungan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat), maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang identitas reponden:

I. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil penelitian Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat), penulis perlu mengetahui identitas pegawai, yang dimulai dari jenis kelamin. Untuk mengetahui identitas Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Meranti, penulis akan memaparkannya dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Anggota Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	8	80%
2	Perempuan	2	20%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat.

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	16	80%
2	Perempuan	4	20%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2020

Berdasarkan penyajian pada tabel diatas, terkait dengan identitas responden berdasarkan jenis kelaminnya, maka yang paling mendominasi dari masing-masing responden adalah jenis kelamin laki-laki, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan tabel yang telah disajikan, baik itu dari responden pegawai/anggota, ataupun dari responden masyarakat.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat), serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti. Usia sangat mempengaruhi cara berfikir seseorang, semakin dewasa usia seseorang, maka cara berfikirnyapun

sudah berbeda, sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa memberikan pendapat akan suatu objek yang akan dinilai, termasuk dalam penelitian ini. Berikut identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia, dimana penulis akan menyajikannya pada tabel berikut ini:

Tabel V.3: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Anggota Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	-	-
2	31-40 Tahun	4	40 %
3	41-50 Tahun	3	30 %
4	>50 Tahun	3	30 %
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Tabel V.4: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	6	30 %
2	31-40 Tahun	10	50 %
3	41-50 Tahun	1	5 %
4	>50 Tahun	3	15 %
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Berdasarkan penyajian data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan jenis usianya masing-masing, dimana usia 31-40 tahun menjadi usia paling mendominasi pada penelitian yang sedang penulis teliti saat ini, baik itu responden dari Dinas Kehutanan ataupun dari masyarakat yang dijadikan responden penelitian.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat), serta dengan cara penyebaran kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	-	-
4	Diploma	-	-
5	Sarjana S1/S2	10	100%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	-
2	SMP	5	25%
3	SMA	10	50%
4	Diploma	-	-
5	Sarjana S1/S2	5	25%
Jumlah		20	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Di lapangan, 2020

Berdasarkan penyajian data pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah responden berdasarkan Pendidikan masing-masing, dimana untuk pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pendidikan rata-rata Sarjana S1/S2, sedangkan untuk masyarakat masyarakat memiliki pendidikan SMA paling mendominasi pada penelitian yang sedang penulis teliti saat ini, baik itu responden dari Dinas Kehutanan ataupun dari masyarakat yang dijadikan responden penelitian.

Selanjutnya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang berhasil penulis dapat dilapangan, dimana hasilnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini:

B. Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat).

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang di maksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat), dan indikator yang penulis gunakan adalah berdasarkan teori Handoko (2009;362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap. Tahap-tahapnya adalah :

- a. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan), Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

- b. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan.
- d. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan, Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).
- e. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan, Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator berjumlah sebanyak 3 Sub indikator atau item penilaian setiap indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui

hasil dari indikator pertama penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat) maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk Tabel dan juga analisis berikut ini:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Penetapan standar pelaksanaan mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dari proses yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah proses tersebut sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum.

Tabel V.7: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH” terhadap pembahasan indikator pertama yaitu Penetapan Standar.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.	9	1	0	10
2	Melakukan penjagaan perlindungan hutan	9	2	0	10
3	Melakukan pemeliharaan hutan	10	0	0	10
Jumlah		27	3	0	30
Rata-Rata		9	1	0	10
Persentase		90%	10%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan data yang telah disajikan pada pembahasan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban yang paling mendominasi dari responden anggota bidang Kehutanan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan

Meranti adalah jawaban pada kategori Terlaksana, dengan persentase 90% dari keseluruhan responden yang diberikan pertanyaan, hal ini tentu saja memberikan fakta bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan pengakuan bahwa mereka memang telah menjalankan tugasnya dibidang pengawasan dan juga khususnya dalam menjaga kelestarian hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu, untuk jawaban pada kategori Cukup Terlaksana, responden anggota Dinas Kehutanan yang memberikan jawabannya hanya ada sebanyak 2 orang atau 10% dari total keseluruhan anggota yang dijadikan sampel.

Tabel V.8: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terhadap Pembahasan Indikator Pertama Yaitu Penetapan Standar.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan.	2	6	12	20
2	Melakukan penjagaan perlindungan hutan	1	1	18	20
3	Melakukan pemeliharaan hutan	6	4	10	20
Jumlah		9	12	40	60
Rata-Rata		3	4	13	20
Persentase		15%	20%	65%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian di lapangan, 2020

Dari hasil data yang penulis dapatkan dilapangan, dimana tabel diatas merupakan data olahan dari penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan terhadap responden masyarakat, dan setelah dilakukan olah data, maka penulis

menemukan jawaban paling mendominasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar indikator yang pertama adalah jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana” dimana jumlah responden yang memiliki kategori ini adalah sebanyak 65% atau 13 orang dari 20 orang yang berikan pertanyaan oleh peneliti, dari jawaban tersebut dapat ditarik kesimpulan dimana masyarakat menilai jika kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kep. Meranti belum terlaksana, khususnya dalam melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap kondisi hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang telah penulis sajikan pada tabel diatas, penulis juga akan memberikan sajian hasil penelitian dengan metode wawancara yang juga telah penulis lakukan dengan beberapa informan dilapangan, salah satunya adalah Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Bapak Maringan Pakpahan, SH. dimana berdasarkan penjelasan yang beliau berikan, dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan hutan memang sedang di upayakan untuk saat ini, dan untuk mengetahui lengkapnya, maka penulis akan menyajikannya pada hasil wawancara dibawah ini:

“Sosialisasi selalu kita lakukan, kita mengajak masyarakat untuk ikut menjaga hutan, karna bagaimanapun hutan menjadi salah satu alasan manusia masih hidup di dunia ini, yang terjadi saat ini memang kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap kondisi hutan mereka, masing menganggap hutan ini sebagai sumber rezeky yang boleh di garap sepuasnya” (Wawancara, 2 July 2020, Pukul 10.30 Wib, Bapak Maringan Pakpahan, SH)

Selain pernyataan diatas, Bidang Kehutanan Penataan, dan Penataan PPLH yaitu Bapak Maringan Pakpahan, SH memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan penjagaan terhadap hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan tanggapan yang beliau berikan terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pelestarian dan penjagaan terhadap kawawasan hutan adalah sebagai berikut:

“Untuk penjagaan hal ini menjadi wewenang dari polisi kehutanan, dan kita juga telah melakukan koordinasi dengan mereka, tentunya mereka punya kebijakan untuk melaksanakan tugas itu” (Wawancara, 2 July 2020, Pukul 10.30 Wib, Bapak Maringan Pakpahan, SH)

Setelah hasil penelitian diatas penulis sajikan, diluar dari informasi tersebut, penulis juga telah melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi dilapangan, dimana pada fakta yang telah penulis temukan, masyarakat mengaku bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung terkait dengan ajakan untuk menjaga kelestarian hutan, baik sosialisasi tatap muka ataupun hanya sekedar himbauan, masyarakat mengaku belum melihat upaya tersebut dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini tentu saja berbeda dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Maringan Pakpahan, SH selaku informan penulis yang memiliki informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, maka kesimpulan yang penulis dapat dari indikator yang pertama ini adalah, pelaksanaan penetapan standar dengan masing-masing sub penilaiannya yaitu sosialisasi, penjagaan hutan, dan pengawasan terhadap hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi

Barat, jika dilihat dari fakta-faktanya dilapangan, maka dapat disimpulkan pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan terlaksana dengan baik.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar tentunya akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat, hal ini akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika nantinya proses pengawasan dilakukan, dan untuk mengetahui pembahasan tentang penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan tabel berikut ini:

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota Bidang Kehutanan Terhadap Pembahasan Indikator Kedua Yaitu Menentukan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan penyidikan	8	2	0	10
2	Membuat laporan kegiatan	10	0	0	10
3	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	9	1	0	10
Jumlah		27	3	0	30
Rata-Rata		9	1	0	10
Persentase		90%	10%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan data pada tabel V.8 diatas, dapat dilihat bahwa jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden anggota Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah jawaban dengan kategori

Telaksana, dimana jumlah responden yang memberikan jawabannya pada pembahasan indikator ini memiliki rata-rata sebanyak 9 orang dari total 10 orang responden, dengan persentase mencapai 90%, dan sisanya adalah sebanyak 1 orang dengan pilan jawaban yang diberikan adalah kategori Cukup Terlaksana.

Berdasarkan jawaban diatas, tentunya penulis menarik kesimpulan bahwa anggota dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan pendapat mereka jika pelaksanaan penyidikan kasus, laporan-laporan dan juga koordinasi telah dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait diantaranya adalah masyarakat dan polisi kehutanan.

Tabel V.10: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terhadap Pembahasan Indikator Menentukan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan penyidikan	6	2	12	20
2	Membuat laporan kegiatan	2	4	14	20
3	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	8	4	8	20
Jumlah		16	10	34	60
Rata-Rata		5	3	12	20
Persentase		25%	15%	60%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Pada tabel V.10 diatas, data yang disajikan memberikan gambaran bahwa masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepercayaan mereka terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten

Kepulauan Meranti, hal ini diperkuat berdasarkan pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuesioner yang mana jawaban paling dominan dari seluruh responden berada pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan jumlah responden rata-ratanya adalah sebanyak 12 orang masyarakat (60%), lalu di ikuti oleh jawaban pada kategori Terlaksana, dengan jumlah responden yang memiliki kategori ini adalah sebanyak 5 orang (60%), dan yang terakhir adalah jawaban yang diberikan responden masyarakat terhadap kategori Cukup Terlaksana, dengan jumlah rata-rata yang memilih kategori ini adalah sebanyak 3 orang (15%) dari total keseluruhan responden mencapai 20 orang masyarakat.

Selain hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan terhadap masing-masing responden, penulis juga telah melakukan proses wawancara terhadap informan penulis yang dianggap mengetahui informasi tentang masalah-masalah yang penulis teliti, dimana dalam hal ini penulis mewawancarai Bidang Kehutanan, Penataan dan Penataan PPLH, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Bapak Maringan Pakpahan, SH adapun informasi yang diberikan beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis seputar pembahasan indikator yang ke dua adalah sebagai berikut:

“Sudah dilakukan juga, koordinasi selalu dilakukan sebagai salah satu bagian penyidikan dan menggali informasi, khususnya koordinasi dengan masyarakat baik itu tetua adat ataupun organisasi kemasyarakatan, begitu juga dengan pihak Kepolisian, khususnya Polisi Kehutanan, kita selalu aktif melakukan koordinasi untuk mengatasi penebangan liar di kawasan hutan Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi Barat” (Wawancara, 2 July 2020, Pukul 10.30 Wib, Bapak Maringan Pakpahan, SH)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis berikan kesimpulan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan

Meranti, melalui Bapak Maringan Pakpahan, SH mengatakan bahwa proses koordinasi dan penyidikan terhadap proses tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum telah dilakukan oleh jajarannya, hal ini tentunya bertolak belakang dari apa yang telah disampaikan oleh masyarakat disekitar Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, memang ditemukan masih banyak masyarakat yang mengakui menemukan penebangan liar terjadi dikawasan hutan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah pengukuran dan monitoring (pengawasan) maka ditentukanlah pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada beberapa langkah untuk pelaksanaan pengukuran, yakni antara lain:

1. Pengamatan (Observasi) yakni melakukan pengamatan terhadap objek yang dijadikan bahan pekerjaan.
2. Laporan-laporan Lisan Tertulis yakni membuat laporan yang didapat dari hasil pengamatan terhadap objek, untuk dijadikan bahan langkah yang akan dilaksanakan selanjutnya
3. Metode-metode otomatis yakni melaksanakan pengukuran dengan menggunakan metode yang telah ditentukan
4. Inspeksi Pengujian (test) atau dengan mengambil sample yakni melakukan pengujian terhadap objek yang telah didapat dan proses apakah objek tersebut layak atau tidak, bahkan diperlukan sample untuk percobaannya itu malah menguatkan hasilnya.

Dengan demikian, maka pengukuran pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk melakukan tindakan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dan

mengetahui sejauh mana proses pengawasan tersebut dilakukan, hal inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui sejauh mana proses pengawasan yang telah terlaksana dalam mencegah terjadinya pembalakan liar atau penebangan pohon secara ilegal di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan untuk mengetahui pelaksanaan proses tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian terkait pada tabel berikut ini:

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota Bidang Kehutanan Terhadap Pembahasan Indikator Ketiga Yaitu Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Evaluasi dan Pemantauan Hutan	10	0	0	10
2	Melakukan kajian dampak lingkungan hutan	10	0	0	10
3	Sidak (Inspeksi Mendadak)	10	0	0	10
Jumlah		30	0	0	30
Rata-Rata		10	0	0	10
Persentase		100%	0%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tindakan-tindakan seperti pelaksanaan evaluasi dan pemantauan hutan, melakukan kajian dampak lingkungan, dan sidak sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini dipertegas dari perhitungan

data dan jawaban yang diberikan melalui pegisian kuesioner penelitian yang penulis ajukan, dimana hasilnya adalah menunjukkan bahwa seluruh jawaban yang diberikan oleh pegawai menyatakan Terlaksana secara 100%.

Untuk mendapat hasil jawaban yang berimbang, penulis juga melakukan penyebaran kuesioner terhadap masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dimana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah benar telah dilakukan pemantauan, pemeliharaan, dan juga pelaksanaan sidak terhadap kondisi hutan hutan diwilayah kecamatan tersebut, dan adapun jawaban yang diberikan oleh masyarakat setempat adalah sebagai berikut:

Tabel V.12: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terhadap Pembahasan Indikator Ketiga Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Evaluasi dan Pemantauan Hutan	2	8	10	20
2	Melakukan kajian dampak lingkungan hutan	6	4	10	20
3	Sidak (inspeksi Mendadak)	1	3	16	20
Jumlah		9	15	36	60
Rata-Rata		3	5	12	20
Persentase		15%	25%	60%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Dari hasil pembahasan dan penyajian data yang telah disajikan pada tabel diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa masyarakat memberikan

jawaban mereka di dominasi kepada jawaban yang menyatakan ketidak puasan, diantaranya adalah jawaban paling mendominasi adalah jawaban kurang terlaksana, dimana untuk kategori jawaban ini, masyarakat memberkan jawabannya sebanyak 12 orang responden masyarakat dari total keseluruhan sebanyak 20 orang yang dimintai keterangan, dengan demikian maka persentase untuk jawaban paling mendominasi ini adalah sekitar 60%, dan di ikuti dengan jawaban “Cukup Terlaksana” dengan jumlah sebanyak 5 orang (25%), dan yang terakhir adalah jawaban yang diberikan dengan kategori Terlaksana, dimana jumlah responden yang memilih jawaban ini adalah sebanyak 3 orang, degan persentasenya mencapai 15%. Dan berdasarkan jawaban-jawaban tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat menilai, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti belum menjalankan fungsinya dengan baik dalam upaya pengawasan terhadap hutan-hutan yang ada.

Untuk melengkapi jawaban diatas, penulis juga memintai keterangan kepada informan yang dianggap memiliki kriteria atau paling memahami situasi dilapangan, dimana informan penulis salah satunya adalah Bidang Kehutanan Penataan dan Penataan PPLH, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Bapak Maringan Pakpahan, SH, dalam hal ini, pertanyaan yang penulis ajukan adalah tentang upaya pemantauan, evaluasi, kajian-kajian dampak lingkungan, dan melakukan sidak terhadap situasi hutan yang ada saat ini, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Permasalahan pemantauan dan sidak ini sudah kita lakukan selama ini, tetapi tentunya tidak selalu kan harus disosialisasikan kepada masyarakat kalau kita sedang melakukan pemantauan, namanya sidak,

harus secara tiba-tiba dan mendadak agar apa yang ditargetkan bisa kita tangkap apabila memang melanggar aturan yang ada, selama ini sudah banyak yang kita tangkap, jumlahnya sudah puluhan orang” (Wawancara, 2 July 2020, Pukul 10.30 Wib, Bapak Maringan Pakpahan, SH)

Selain informan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penulis juga melakukan wawancara terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan hasil hutan yang berhasil keluar dibawa oleh masyarakat, salah satunya adalah penjual atau pelaku usaha mikro, penjual kayu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dimana selama ini, kebanyakan kayu yang di perjual belikan adalah hayu hasil pembalakan liar di hutan-hutan sekitar Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan untuk informasi lengkapnya, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Burhan Siagian selaku pengusaha jual beli kayu olahan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Kita tidak tahu itu, kita tidak pernah menanyakan kayu kayu itu datangnya dari mana, karna memang ketika kita beli, kayu sudah dipotong-potong, jadi kita ini tidak peduli kayu tersebut yang diambil merupakan kayu layak potong atau kayu yang dibawah usia potong” (Wawancara, 3 July 2020, Pukul 15.00 Wib, Burhan Siagian, Pelaku usaha jual beli kayu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pedagang kayu tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya kayu yang mereka beli, karna kayu-kayu yang mereka beli juga sudah dalam bentuk kayu olahan berbentuk papan dan kayu tiang, hal ini menjadi salah satu kendalanya, kecuali kayu yang dibeli

merupakan kayu bulat besar, maka pihak pengusaha tidak akan mau membeli dari pekerja pemotong kayu itu sendiri.

Dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, pada dasarnya, kayu-kayu yang dijual di pasaran selama ini memang benar adalah kayu yang diambil dari hutan secara bebas dan tidak bertanggungjawab, akan tetapi sulinya pengawasan yang akan dilakukan dan tidak adanya pengawasan dan sanksi yang diberikan kepada pedagang yang menjual kayu olahan tersebut menjadi penyebab menjamurnya penebangan hutan secara ilegal khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

Untuk mengetahui hasil penelitian dari indikator yang ke empat ini, penulis telah melakukan penelitian dengan melakukan penyebaran kuesioner dan juga wawancara kepada informan-informan terkait yang dianggap memahami kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan, dimana hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.13 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota Bidang Kehutanan Terhadap Pembahasan Indikator Keempat Yaitu Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membuat pos penjagaan.	6	4	0	10
2	Laporan dari masyarakat.	2	0	8	10
3	Inspeksi/ pemerisaan rutin.	6	3	1	10
Jumlah		14	7	9	30
Rata-Rata		5	2	3	10
Persentase		50%	20%	30%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, penulis dapat menjelaskan bahwa jawaban yang diberikan oleh Pegawai memiliki jawaban yang beragam, dan hasil penyebaran kuesioner memiliki jawaban paling mendominasi yaitu ada pada kategori terlaksana, dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 5 orang, dengan persentasenya mencapai 50%, lalu di ikuti jawaban yang diberikan pegawai pada kategori Kurang Terlaksana, dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya sebanyak 3 orang (30%), lalu yang terakhir adalah jawaban pada kategori Cukup Terlaksana, dimana persentase dari jawaban ini adalah sebanyak 20% dengan jumlah responden sebanyak 2 orang.

Sementara itu, untuk melengkapi hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, penulis juga telah melakukan penyebaran kuesioner terhadap

beberapa responden masyarakat guna mendapatkan jawaban yang paling kredibel, dan adapun hasil penyebaran kuesioner penulis terhadap masyarakat adalah:

Tabel V.14: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terhadap Pembahasan Indikator Keempat Yaitu Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Membuat pos penjagaan.	1	3	17	20
2	Laporan dari masyarakat.	2	4	14	20
3	Inspeksi/ pemerisaan rutin.	4	2	14	20
Jumlah		7	9	45	60
Rata-Rata		2	3	15	20
Persentase		15%	25%	75%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Sementara itu, berdasarkan data yang penulis dapatkan dari penyebaran kuesioner terhadap masyarakat dilapangan, ditemukan jawaban yang bertolak belakang dengan hasil yang disampaikan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat memberikan jawaban mereka secara mendominasi pada kategori jawaban Kurang Terlaksana, dengan persentase mencapai 75% dimana jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 45 orang, dan di ikuti oleh jawaban pada kategori Cukup Terlaksana dengan total jumlah responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini sebanyak 9 orang (25%), dan yang terakhir adalah jawaban pada kategori terlaksana, sebanyak 7 orang dengan persentase mencapai 15%.

Untuk melengkapi hasil penelitian diatas, penulis juga telah melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang berasal dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Bidang Kehutanan Penataan dan Penataan PPLH, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Bapak Maringan Pakpahan, SH. dimana tanggapan yang beliau berikan terkait dengan pembuatan pos penjagaan, memberikan respon terkait laporan masyarakat. adapun hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Sudah dijalankan semua itu, pos penjagaan sudah kita buat, dan itu selalu ditambah bahkan diperbaiki, dan khususnya untuk laporan-laporan masyarakat, justru kita sangat membutuhkan laporan masyarakat, kalau bisa, masyarakat aktif terus memberikan laporan karna sangat membantu kita dalam melakukan pemantauan terhadap kondisi hutan, kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan” (Wawancara, 2 July 2020, Pukul 10.30 Wib, Bapak Maringan Pakpahan, SH)

5. Pengambilan koreksi bila di perlukan.

Tabel V.15 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Anggota Bidang Kehutanan Terhadap Pembahasan Indikator Kelima Yaitu Pengambilan koreksi bila di perlukan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sanksi Peringatan tertulis	7	3	0	10
2	Sanksi penarikan barang bukti	10	0	0	10
3	Diproses atau di adili	10	0	0	10
Jumlah		27	3	0	30
Rata-Rata		9	1	0	10
Persentase		90%	10%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dilapangan, ditemukan data-data sebagaimana telah di sajikan pada tabel diatas, dan hasil temuan dilapangan memberikan fakta bahwa pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan jawaban mendominasi yang mengatakan bahwa mereka telah memberikan sanksi kepada pelaku pembalakan atau penebangan hutan secara ilegal, hal ini di buktikan dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 90% (9 orang) pegawai yang diberikan kuesioner, keseluruhan responden tersebut memberikan jawaban mereka pada kategori Terlaksana, dan sisanya memberikan jawaban kepada kategori jawaban Cukup Terlaksana, sebanyak 10%. Dengan ini membuktikan bahwa pihak Dinas Kehutanan mengakui jika mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Kehutanan dalam membrantas pembalakan liar di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Tabel V.16: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terhadap Pembahasan Indikator Kelima Yaitu Pengambilan koreksi bila di perlukan.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Sanksi Peringatan Tertulis	0	2	18	20
2	Sanksi Penarikan Barang Bukti	2	2	16	20
3	Diproses Atau Di Adili	10	5	5	20
Jumlah		12	9	39	60
Rata-Rata		4	3	13	20
Persentase		20%	15%	65%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Dalam proses penelitian yang penulis lakukan dilapangan, selain melakukan penyebaran kuesioner terhadap Anggota Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, penulis juga melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dimana tujuan dari proses ini adalah untuk mencari jawaban yang berimbang dan dapat membandingkan antara jawaban yang diberikan pihak Dinas dan juga Masyarakat, adapun pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan berkaitan dengan proses pemberian sanksi kepada pelaku pembalakan liar.

Dan berdasarkan data yang telah penulis sajikan pada tabel diatas, penulis menemukan fakta bahwa jawaban yang berikan masyarakat di dominasi kepada jawaban dengan kategori “Kurang Terlaksana” dengan rata-rata responden yang memberikan jawabannya berjumlah sebanyak 13 orang atau persentasenya mencapai 65% dari total keseluruhan peserta responden sebanyak 20 orang.

Sementara itu, jawaban selanjutnya yang diberikan oleh responden penelitian adalah pada kategori terlaksana, dengan jumlah rata-rata jawaban yaitu sebanyak 4 orang responden masyarakat dengan presentase mencapai 65%, dan di ikuti dengan jawaban terakhir yaitu kategori Cukup Terlaksana, dengan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 3 orang dan persentasenya mencapai 15% dari keseluruhan peserta yang berjumlah sebanyak 20 orang responden masyarakat.

Melanjutkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diatas, penulis juga melengkapinya dengan hasil wawancara kepada masing-masing informan yang dianggap memiliki kapasitas kredibel untuk memberikan jawaban dan pernyataannya, diantaranya adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan

Meranti, yaitu Bidang Kehutanan Penataan dan Penataan PPLH, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Bapak Maringan Pakpahan, SH, dalam hal ini, pertanyaan yang penulis ajukan adalah tentang bagaimana proses pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pembalakan liar di Hutan Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan jawaban yang diberikan oleh beliau adalah sebagai berikut:

“Secara langsung, kita tidak bisa memberikan sanksi, tetapi koordinasi yang kita lakukan, khususnya dengan pihak berwenang seperti polisi kehutanan dan stakeholder lainnya, secara langsung akan memberikan efek dari tindakan sanksi tad, nantinya ketika pengawasan dilakukan bersama dengan polisi kehutanan, dan ditemukan pelaku pembalakan liar tersebut, maka berkasnya akan diserahkan kepada polisi untuk segera di proses secara hukum, diluar itu, tentunya ada proses adat istiadat yang juga harus kita hargai prosesnya” (Wawancara, 2 July 2020, Pukul 10.30 Wib, Bapak Maringan Pakpahan, SH)

Selain informan dari pihak Dinas Kehutanan, penulis juga melakukan wawancara terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan hasil hutan yang berhasil keluar dibawa oleh masyarakat, salah satunya adalah penjual atau pelaku usaha mikro, penjual kayu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dimana selama ini, kebanyakan kayu yang di perjual belikan adalah hayu hasil pembalakan liar di hutan-hutan sekitar Kecamatan Tebing Tinggi Barat, salah satu pertanyaan yang penulis ajukan adalah tentang penerapan sanksi yang selama ini dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, informan yang berhasil penulis temui adalah Bapak Burhan Siagian selaku pengusaha jual beli kayu olahan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk yang tertangkap dilapangan, setau saya tidak sampai dipenjara, paling hanya di sita hasil hutan yang berhasil di ambil, dan membayar denda serta memberikan surat keterangan perjanjian untuk tidak mengilanginya lagi, hanya sekedar itu saja, tidak sampai ke meja hijau atau penjara” (Wawancara, 3 July 2020, Pukul 15.00 Wib, Burhan Siagian, Pelaku usaha jual beli kayu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan fakta bahwa memang proses penerapan sanksi yang berlaku selama ini sangat lemah, dimana masyarakat yang penulis temui memberikan pengakuan bahwa mereka yang berani mengambil kayu di hutan adalah mereka yang telah dijamin tidak akan di tangkap, dan walaupun mereka tertangkap, tidak akan sampai pada proses hukum, hal ini di duga ada kerjasama yang dilakukan antara polisi kehutanan dengan pelaku penebangan hutan secara ilegal.

C. Rekapitulasi Hasil Penyebaran Kuesioner Kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Terkait Dengan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

Untuk mencari kesimpulan pada keseluruhan hasil penyebaran kuesioner yang telah disajikan sebelumnya, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk perhitungan hasil rekapitulasi dari masing-masing tabel pada pembahasan sebelumnya, dimana setiap kesimpulan per indikatornya akan di bagi dengan jumlah dari seleuruhan indikator yang dibahas, adapun indikatornya adalah Penetapan Standar, Menentukan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan, Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan dan adapun hasil

rekapitulasi hasil dari penyebaran kuesioner pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.17: Hasil Rekapitulasi Masing-Masing Pembahasan Indikator Terkait Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan standar pelaksanaan	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (100%)
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	5 (50%)	2 (20%)	3 (30%)	10 (100%)
5	Pengambilan koreksi bila di perlukan	9 (90%)	1 (10%)	0 (0%)	10 (100%)
Jumlah		42	5	3	50
Rata-Rata		8	1	1	10
Persentase		80%	10%	10%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan tabel rekapitulas di atas dapat dilihat hasil secara keseluruhan dari penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan di lapangan, bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Meranti rata-rata dominan menjawab “Terlaksana” yang berjumlah 8 orang dengan persentase 80%, hal ini dikarenakan bahwa pegawai menilai dari pelaksanaan pengawasan hutan untuk menghindari pembalakan liar sudah terlaksana walaupun belum secara maksimal.

Tabel V.18: Hasil Rekapitulasi Masing-Masing Pembahasan Indikator Terkait Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat)

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan standar pelaksanaan	3 (15%)	4 (20%)	13 (65%)	20 (100%)
2	Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	5 (25%)	3 (15%)	12 (60%)	20 (100%)
3	Pengukuran pelaksanaan kegiatan	3 (15%)	5 (25%)	12 (60%)	20 (100%)
4	Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	2 (15%)	3 (25%)	15 (75%)	20 (100%)
5	Pengambilan koreksi bila di perlukan	4 (20%)	3 (15%)	13 (65%)	20 (100%)
Jumlah		17	18	65	100
Rata-Rata		3	4	13	20
Persentase		15%	20%	65%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2020

Berdasarkan penyajian data pada tabel rekapitulasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan bahwa masyarakat selat panjang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan masih Kurang terlaksana yaitu rata rata berjumlah 13 orang dengan persentase 65%, hal ini beralasan karena pada faktanya dilapangan masyarakat menilai bahwa penggunaan dari masih banyak oknum-oknum yang melakukan pembalakan hutan secara liar.

D. Faktor Penghambat yang Dialami Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pembalakan Hutan Secara Liar Di Selat Panjang Kabupaten Meranti.

Dalam menjalankan kebijakan yang bersifat publik, tentunya pada proses dilapangan, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menghadapi beberapa kendala yang akan menghambat kegiatan pengawasan terhadap pembalakan hutan secara liar, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala selama ini, maka penulis akan menyajikannya berikut ini:

1. Keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta personil Polisi Kehutanan yang diberikan wewenang untuk menjaga hutan dari proses pembalakan liar, sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh instansi Pemerintah maupun Kepolisian.
2. Selanjutnya adalah kurangnya Sumber Daya Anggaran untuk melakuka proses pengawasan dan sidak secara berkala, hal ini dikarenakan anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap hutan yang luas, anggaranya cukup besar, khususnya terkait dengan operasional kendaraan, pangan, tim, dan estimasi proses pengawasan ketika berada dilapangan, hal ini disampaikan langsung oleh Maringan Pakpahan, SH.
3. Kendala selanjutnya adalah berkaitan dengan kesadaran masyarakat, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Maringan Pakpahan, SH, sekuat apapun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, apabila tidak di dukung baik oleh masyarakat, dan aparat yang terpercaya dilapangan, maka proses pencegahan pembalakan atau

penebangan hutan secara ilegal tidak akan pernah berhasil di hilangkan, karna masyarakatnya sendiri memilih untuk merusak hutan mereka sendiri.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya, maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik dari Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada masyarakat serta tahapan-tahapan wawancara serta penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan di lokasi penelitian, dengan proses yang telah dilakukan tersebut, maka penulis mendapatkan jawaban yang menjadi kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi: Kecamatan Tebing Tinggi Barat) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk indikator pertama yang membahas tentang “Penetapan Standar Pelaksanaan” hasil kesimpulan yang didapatkan dari penyebaran kuesioner dengan masyarakat adalah jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana” hal ini penulis dapatkan dari tanggapan masyarakat yang menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum terlalu maksimal dalam menuntaskan pembalakan liar pada hutan khususnya di Kepulauan Meranti, hal ini juga dikarenakan sosialisasi yang dari Dinas juga belum lakukan secara merata jadi masih banyak yang

belum mengerti dampaknya apabila dilakukannya pembalakan kayu secara liar.

2. Sementara itu, untuk indikator yang ke 2 (dua), yaitu pembahasan tentang “Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan”, jawaban yang dihasilkan adalah kategori “Kurang Terlaksana” hasil ini ditemukan dari proses penyebaran kuesioner dengan responden masyarakat yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan penyidikan terhadap permasalahan pembalakan liar di Kepulauan Meranti, dimana semakin maraknya kasus pembalakan liar kayu, sehingga dikhawatirkan tidak hanya hutan saja yang rusak tetapi kehidupan fauna juga bisa juga terancam dan tentunya juga sangat membahayakan kehidupan masyarakat.
3. Untuk indikator “Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan” atau indikator yang ke 3 (tiga) dalam penelitian ini, kesimpulan jawaban yang didapatkan adalah kategori jawaban “Kurang Terlaksana” yang terdiri dari tiga pertanyaan yaitu tentang Evaluasi dan Pemantauan Hutan, Melakukan Kajian Dampak Lingkungan Hutan, dan Sidak, dari ketiga pertanyaan ini dapat diambil kesimpulannya bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dikatakan berhasil dalam meminimalisir permasalahan pembalakan liar hal ini tentunya dilihat dari tolak ukur atau dampak setelah dilakukannya kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan salah satunya adalah melakukan evaluasi dan memberikan dampak setelah dilakukannya evaluasi pengawasan tersebut.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa belum ada dampak positif yaitu merujuk kepada berkurangnya kasus pembalakan liar bahkan fakta sebaliknya semakin banyak jumlah pembalak liar dan tumbuh silih berganti.

4. Penelitian pada indikator selanjutnya yaitu “Perbandingan Pelaksanaan dengan Standard dan Analisa Penyimpangan”, adapun kesimpulan jawaban yang ditemukan pada penelitian ini adalah jawaban dengan kategori “Kurang Terlaksana” dimana jawaban ini penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat, yang terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu membuat pos penjagaan, laporan dari masyarakat, inspeksi/pemeriksaan rutin, dari ketiga hal yang ditanyakan langsung ke masyarakat bahwa pihak Dinas sudah membuat pos-pos penjagaan walaupun secara merata, dan pos-pos yang sudah tersedia jarang adanya sumber daya manusia atau petugas yang berjaga secara konsisten.
5. Untuk indikator yang ke 5 (lima) yaitu “Pengambilan Koreksi Bila Diperlukan”, kesimpulan jawaban yang di dapatkan pada penelitian ini adalah dengan kategori “Kurang Terlaksana” hasil penelitian ini penulis dapatkan dari hasil penyebaran keusioner kepada masyarakat dimana masyarakat memiliki penilaian bahwa pihak Dinas tidak ada memberikan sanksi jera kepada pelaku yang mengakibatkan para oknum tidak berhenti untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan.
6. Indikator yang terakhir adalah tentang “Pengambilan Koreksi Bila Diperlakukan”, dimana jawaban kesimpulan untuk indikator ini adalah

jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana” hasil penelitian ini penulis dapatkan dari hasil penyebaran keusioner kepada masyarakat.

Selain hasil penelitian yang telah penulis sajikan diatas, dalam pelaksanaannya, tentunya pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya, dimana diantaranya adalah terkait dengan keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta personil Polisi Kehutanan yang diberikan wewenang untuk menjaga hutan dari proses pembalakan liar, sumber daya yang dimaksud dalam hal ini adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh instansi Pemerintah maupun Kepolisian.

Selanjutnya adalah kurangnya Sumber Daya Anggaran untuk melakukan proses pengawasan dan sidak secara berkala, hal ini dikarenakan anggaran yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap hutan yang luas, anggarannya cukup besar, khususnya terkait dengan operasional kendaraan, pangan, tim, dan estimasi proses pengawasan ketika berada dilapangan, hal ini disampaikan langsung oleh Maringan Pakpahan, SH.

Kendala selanjutnya adalah berkaitan dengan kesadaran masyarakat, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Maringan Pakpahan, SH, sekuat apapun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, apabila tidak di dukung baik oleh masyarakat, dan aparat yang terpercaya dilapangan, maka proses pencegahan pembalakan atau penebangan hutan secara ilegal tidak akan pernah berhasil di hilangkan, karna masyarakatnya sendiri memilih untuk merusak hutan mereka sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian tentang pengawasan terhadap hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah:

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan agar melakukan penelitian dengan mengangkat isu yang lebih menarik atau bisa memperdalam lebih lanjut penelitian yang sudah ada, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih luas, tentunya harus mencakup keseluruhan pembahasan tentang penebangan hutan secara ilegal.
- b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian ini, agar penelitian ini bisa di aplikasikan secara nyata oleh pihak yang dituju seperti pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polisi Kehutanan.
- c. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama yaitu Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

- d. Mahasiwa/i lebih menggali lagi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pada Pembalakan Liar Di Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara banyak membaca buku, mencari permasalahan yang berkembang di lapangan, karna mahasiswa harus peka terhadap masalah yang berkembang di lapangan dan dampak yang dihasilkan.
- e. Penulis menyarankan agar masyarakat yang berada di lokasi sekitar hutan, khususnya dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tebing Tebinggi Barat, agar sama-sama memberikan kontribusinya menjaga hutan yang menjadi paru-paru dunia dalam menghasilkan oksigen, karna selama ini, masyarakat jugalah yang memang menjadi pelaku penebangan hutan itu sendiri.
- f. Saran terakhir tentunya penulis berikan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerjasama dengan Kepolisian Kehutanan agar nantinya dapat meningkatkan proses pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas di kawasan hutan, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pembalakan liar yang nantinya bisa menyebabkan kerusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKAAN

Buku-Buku

- Arief, Arifin, 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Bandung: Kanisius.
- Andisasmitta, Raharjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- ArsyadAzhar, 2002. *Pokok-poko kmanajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cardoso Faustino, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Darwis, Eni Yulinda, dan Lamun Bathara, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Hasibuan, Melayu. S. P, 2012. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S. P,2009. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta, BPFE.
- Handoko, T. Hani, 2009. *Managemen*. Yogyakarta, BPFE-Yogyak.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Mandar Maju.
- Kencana inu Syafiie, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta, BumiAksara.
- Kencana inu Syafiie, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Refika Aditama.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, Salemba Empat.
- Martoyo, Susilo.2000. *ManajemenSumberDayaManusia*. Yokyakarta, BPEE.
- Nawawi, Hadari, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yokyakarta, Gajah Mada University Press.
- Pasolong Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sarwoto,1991. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian,Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: BumiAksara.
- Syaukani dkk, 2004. *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Siswanto, HB, 2005. *Pengantar Managemen*. Jakarta, Bumi Aksara.

Suwatno, Donni Juni Priansa, 2014. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sjamsuddin, Indradi, 2006. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang, Agitek YPN.

Syafri, Wirman, 2012. *Studi Administrasi Publik*. Jatinangor, Erlangga.

Winarno, Budi, 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Media Pressindo

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.

http://www.pengertianpengertian.com/2015/06/pengertian_pembalakan_liar.html diakses pada tanggal 2 september 2016 jam 20.00 wib.

Dokumentasi

Buku pedoman Penyusun Usulan Penelitian(UP), Hasil Penelitian, skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Badan Penerbit Fisipol UIR.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No.09 tahun 2016 tentang pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi dinas daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan menteri kehutanan Republik Indonesia nomor: P.75/menhut-II/2014 tentang polisi hutan.

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.